

PENGUATAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BALI

I Gede Githa Darma Husada

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora,
Universitas Bali Internasional,

Jl. Seroja, Gang Jeruk No. 9A, Denpasar Timur, Bali 80115

Email: ediarimbawa02@gmail.com

Abstrak – Permasalahan sampah di Provinsi Bali menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pariwisata berkualitas. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan belum optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Desa adat sebagai lembaga sosial yang memiliki legitimasi tinggi dipandang memiliki potensi strategis dalam memperkuat tata kelola pengelolaan sampah melalui penerapan *awig-awig*, *pararem*, dan nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran desa adat dalam pengelolaan sampah di Bali, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penguatan kelembagaan desa adat, serta merumuskan strategi penguatan desa adat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *sequential explanatory*. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 200 responden menggunakan teknik *proportional random sampling*, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, regresi linier berganda, serta analisis kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan desa adat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah ($\beta = 0,421$; $p < 0,001$), diikuti oleh partisipasi masyarakat ($\beta = 0,337$; $p = 0,002$), penerapan kearifan lokal ($\beta = 0,284$; $p = 0,011$), dan dukungan pemerintah ($\beta = 0,215$; $p = 0,027$). Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,71 menunjukkan bahwa keempat variabel mampu menjelaskan 71% variasi efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan desa adat melalui pendekatan *collaborative governance* berbasis kearifan lokal merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Bali.

Kata kunci: *collaborative governance*; desa adat; kearifan lokal; pengelolaan sampah; Tri Hita Karana.

Abstract – Waste management has become a major challenge in Bali Province in achieving sustainable development and high-quality tourism. Although the provincial government has introduced several source-based waste management policies, their implementation continues to face obstacles, including limited community participation, inadequate infrastructure, and weak coordination among stakeholders. As a traditional institution with strong social legitimacy, *desa adat* (customary villages) has strategic potential to strengthen waste governance through the implementation of *awig-awig*,

pararem, and the local wisdom values of Tri Hita Karana. This study aims to analyze the role of desa adat in waste management in Bali, identify the factors influencing the effectiveness of strengthening customary village institutions, and formulate strategies to enhance their role in achieving sustainable waste management. This research employed a mixed-methods approach using a sequential explanatory design. Quantitative data were collected through a survey involving 200 respondents selected using proportional random sampling, while qualitative data were obtained through in-depth interviews, observations, Focus Group Discussions (FGDs), and document analysis. Data were analyzed using descriptive statistics, multiple linear regression, and qualitative analysis based on the Miles, Huberman, and Saldaña model. The findings indicate that strengthening customary village institutions has a positive and significant effect on waste management effectiveness ($\beta = 0.421$; $p < 0.001$), followed by community participation ($\beta = 0.337$; $p = 0.002$), local wisdom implementation ($\beta = 0.284$; $p = 0.011$), and government support ($\beta = 0.215$; $p = 0.027$). The Adjusted R^2 value of 0.71 indicates that these variables explain 71% of the variation in waste management effectiveness. The study concludes that strengthening desa adat through a local wisdom-based collaborative governance approach is an effective strategy for promoting sustainable waste management in Bali.

Keywords: collaborative governance; customary village; local wisdom; Tri Hita Karana; waste management.

I. PENDAHULUAN

Provinsi Bali termasuk salah satu destinasi pariwisata internasional dengan peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional melalui sektor pariwisata, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kealamian lanskap, kekayaan tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal membuat Bali menjadi salah satu tujuan wisata utama yang setiap tahunnya menerima jutaan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kontribusi yang besar akibat peningkatan aktivitas pariwisata meningkatkan perekonomian secara utuh sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat pula. Akan tetapi, laju perkembangan sektor pariwisata yang begitu cepat juga menimbulkan berbagai implikasi terhadap lingkungan, salah satunya berupa bertambahnya volume timbulan sampah.

Pemerintah menanggulangi masalah sampah ini menjadi isu strategis. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, perkembangan kawasan permukiman, serta tingginya

mobilitas wisatawan menyebabkan volume sampah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Timbulan sampah tersebut didominasi oleh sampah organik rumah tangga, sampah plastik sekali pakai, limbah dari hotel, restoran, kafe (HOREKA), pasar tradisional, serta aktivitas upacara keagamaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Apabila tidak dikelola secara baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, sungai, dan laut, mengganggu kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas lingkungan hidup, serta mengancam keberlanjutan sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Bali.

Berbagai fenomena pencemaran lingkungan akibat sampah menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai permasalahan teknis semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan

tata kelola pemerintahan (*environmental governance*), perilaku masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Sampah yang mencemari kawasan pantai, sungai, dan objek wisata secara langsung memengaruhi kenyamanan wisatawan serta citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang mengusung konsep pariwisata berbasis budaya (*cultural tourism*) dan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Dengan demikian, pengelolaan sampah menuntut diterapkannya pendekatan yang lebih menyeluruh, yakni dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, komunitas, serta lembaga adat (Permini et al., 2025).

Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 terkait dengan pembatasan sampah plastik sekali pakai menekankan pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui penerapan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R), pemilahan sampah rumah tangga, penguatan bank sampah, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah melalui pembentukan desa dan kelurahan berbasis pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa. Meskipun berbagai kebijakan tersebut telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola persampahan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah, lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bali memiliki modal sosial yang tidak dimiliki oleh banyak daerah lain di Indonesia, yaitu keberadaan desa adat sebagai lembaga sosial budaya yang memiliki legitimasi, kewibawaan, dan pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Desa adat yang merupakan institusi tradisional yang sudah ada jauh sebelum munculnya sistem pemerintahan modern, dan sampai saat ini masih memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, budaya, keagamaan, serta dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui kewenangan yang dimiliki, desa adat dapat menetapkan berbagai ketentuan dalam bentuk *awig-awig* maupun *pararem* yang mengatur hak, kewajiban, serta tata kehidupan masyarakat adat, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Keberadaan peraturan adat atau *awig-awig* dan *pararem* memberikan kekuatan tersendiri dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Berbeda dengan regulasi pemerintah yang bersifat administratif, aturan adat memiliki kekuatan moral, sosial, dan budaya yang lebih tinggi karena lahir dari kesepakatan masyarakat serta ditegakkan melalui mekanisme pengawasan sosial. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat tidak hanya didorong oleh adanya sanksi, tetapi juga oleh rasa memiliki terhadap komunitas, penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga keharmonisan lingkungan. Dengan demikian, desa adat memiliki kapasitas yang besar untuk tampil sebagai aktor utama dalam mengarahkan perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab (Adhitama & Soekamta, 2022).

Berdasarkan sudut pandang teori tata kelola publik, pengelolaan

sampah yang berbasis desa adat turut merefleksikan penerapan konsep collaborative governance. Konsep ini menekankan bahwa penyelesaian persoalan publik tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri, melainkan memerlukan keterlibatan aktif berbagai aktor, seperti masyarakat, lembaga adat, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal. Dalam konteks Bali, desa adat memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat karena memiliki legitimasi sosial yang tinggi sekaligus kemampuan untuk membangun partisipasi kolektif dalam menjaga lingkungan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Penelitian lain juga mengemukakan bahwa penerapan kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan sampah, pengembangan fasilitas persampahan, atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Kajian yang secara khusus membahas penguatan kelembagaan desa adat sebagai institusi lokal dalam tata kelola persampahan masih tergolong terbatas. Padahal, desa adat memiliki modal sosial, kapasitas kelembagaan, serta legitimasi yang dapat menjadi kekuatan utama untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mampu mengkaji secara komprehensif bagaimana peran desa adat dalam mendukung pengelolaan sampah di Bali, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penguatan kelembagaan desa adat, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran desa adat dalam mewujudkan pengelolaan sampah berbasis

masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan konsep tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan (Pratiwi et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana peran desa adat dalam pengelolaan sampah di Bali; (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penguatan kelembagaan desa adat dalam pengelolaan sampah; dan (3) bagaimana strategi penguatan desa adat untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Provinsi Bali. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran desa adat dalam pengelolaan sampah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penguatan kelembagaan desa adat, serta merumuskan strategi penguatan desa adat sebagai bagian dari tata kelola persampahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pariwisata berkualitas di Bali.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory, yakni analisis kuantitatif yang kemudian dilanjutkan dengan pendalaman secara kualitatif. Pemilihan pendekatan tersebut bertujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai penguatan desa adat dalam pengelolaan sampah, baik ditinjau dari keterkaitan antarvariabel maupun dari dinamika penerapan di lapangan.

Penelitian dilakukan pada beberapa desa adat di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar

yang telah menerapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Lokasi tersebut dipilih secara purposive karena memiliki ciri pengelolaan sampah yang relatif maju serta didukung oleh adanya ketentuan adat tentang pelestarian lingkungan.

Populasi penelitian mencakup masyarakat yang berdomisili di wilayah desa adat pada lokasi penelitian. Untuk bagian kuantitatif, sampel berjumlah 200 responden ditetapkan menggunakan teknik proportional random sampling. Informan pada penelitian kualitatif dipilih secara purposive, terdiri atas Bendesa Adat, prajuru desa adat, perangkat desa, pejabat Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPS3R, tokoh masyarakat, serta kelompok pemuda.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, pelaksanaan wawancara mendalam, observasi lapangan, penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen pendukung. Dalam penelitian ini, variabel independen meliputi penguatan kelembagaan desa adat, partisipasi masyarakat, penerapan kearifan lokal, dan dukungan pemerintah, sedangkan variabel dependen adalah efektivitas pengelolaan sampah.

Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R^2). Selanjutnya, data kualitatif dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengintegrasian temuan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif dilakukan pada tahap interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan desa adat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan

efektivitas pengelolaan sampah di Provinsi Bali. Berdasarkan analisis deskriptif, persepsi masyarakat terhadap peran desa adat berada pada kategori yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih memandang desa adat sebagai lembaga yang memiliki legitimasi kuat dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam upaya menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa keberadaan desa adat mampu mendorong kepatuhan masyarakat melalui penyusunan awig-awig dan pararem yang menetapkan kewajiban masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan gotong royong (ngayah), serta menaati sanksi adat apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama. Selain menjalankan fungsi regulasi, desa adat juga berperan sebagai sarana edukasi melalui penyuluhan lingkungan yang dilaksanakan dalam kegiatan banjar, pertemuan masyarakat, maupun aktivitas keagamaan. Kondisi ini menegaskan bahwa desa adat tidak hanya menjalankan fungsi sosial-budaya, tetapi juga bertransformasi menjadi aktor utama dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat (Tresnawaty, 2020).

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel penguatan kelembagaan desa adat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah, dengan nilai koefisien regresi sebesar $\beta = 0,421$ dan tingkat signifikansi sebesar $p < 0,001$. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa semakin kuat kapasitas kelembagaan desa adat, semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan sampah yang dapat diwujudkan. Penguatan

kelembagaan ini terlihat dari kepemimpinan Bendesa Adat, adanya aturan adat yang jelas, konsistensi pelaksanaan awig-awig dan pararem, mekanisme pengawasan, serta penerapan sanksi adat yang dilakukan secara adil kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh regulasi pemerintah, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan lokal dalam membangun kesadaran, kepatuhan, dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Selain penguatan kelembagaan desa adat, penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah, dengan nilai koefisien $\beta = 0,337$ dan tingkat signifikansi sebesar $p = 0,002$. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh tingginya keterlibatan masyarakat dalam beragam aktivitas pengelolaan lingkungan, seperti pemilahan sampah dari rumah tangga, pelaksanaan kerja bakti, pengelolaan bank sampah, pemanfaatan sampah organik sebagai kompos, serta berbagai kegiatan edukasi lingkungan yang diselenggarakan oleh desa adat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian ini, semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar pula peningkatan pengelolaan sampah yang lebih baik dan efisien. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana tidak selalu menjadi penentu tercapainya keberhasilan program, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat. Variabel penerapan kearifan lokal juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah, dengan nilai koefisien $\beta = 0,284$ dan tingkat signifikansi $p = 0,011$. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai budaya yang masih hidup di masyarakat Bali tetap menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran lingkungan. Implementasi filosofi Tri Hita Karana, terutama pada dimensi Palemahan, mendorong masyarakat untuk menjaga

keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan melalui berbagai aktivitas pelestarian alam. Masyarakat memandang bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual, sehingga pengelolaan sampah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis, tetapi juga sebagai wujud pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan. Temuan penelitian selanjutnya mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah, dengan nilai koefisien $\beta = 0,215$ serta tingkat signifikansi sebesar $p = 0,027$. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur persampahan, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), bantuan sarana pengelolaan sampah, pendampingan teknis kepada desa adat, serta penyusunan berbagai regulasi yang mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan variabel lain, keberadaan dukungan pemerintah tetap merupakan faktor penting yang memperkuat kapasitas desa adat dalam melaksanakan program pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Secara simultan, keempat variabel tersebut turut memberi kontribusi besar terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Bali. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,71, yang berarti bahwa sebesar 71% variasi efektivitas pengelolaan sampah dapat dijelaskan oleh penguatan kelembagaan desa adat, partisipasi masyarakat, penerapan kearifan lokal, dan dukungan pemerintah. Sementara itu, sebesar 29% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat

pendidikan, karakteristik wilayah, perkembangan sektor pariwisata, kapasitas kelembagaan desa dinas, dukungan teknologi pengolahan sampah, serta komitmen sektor swasta dalam menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Ni Ketut Sri Lestari, Ni Putu Widya Astuti, 2022).

Temuan kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis desa adat sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dimiliki oleh lembaga adat (Agung et al., 2024). Para informan menyatakan bahwa masyarakat cenderung lebih patuh terhadap aturan yang ditetapkan melalui *awig-awig* dan *pararem* dibandingkan dengan regulasi formal pemerintah. Kepatuhan tersebut muncul bukan semata-mata karena adanya sanksi adat, tetapi juga karena adanya rasa memiliki terhadap komunitas, penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesucian lingkungan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Dengan demikian, desa adat memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Dari perspektif teori modal sosial (*social capital*), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan desa adat dalam pengelolaan sampah didukung oleh adanya unsur kepercayaan (*trust*), norma sosial (*social norms*), dan jejaring sosial (*social networks*) yang telah berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Bali. Ketiga unsur tersebut mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan bersama, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Keberadaan *awig-awig* dan *pararem* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum adat, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai lingkungan kepada masyarakat sehingga

terbentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah (Dewi & Lilasari, 2021).

Penelitian ini turut menunjukkan bahwa filosofi Tri Hita Karana berperan sebagai landasan normatif yang memperkuat penerapan pengelolaan sampah berbasis desa adat. Dimensi Palemahan menegaskan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang wajib dijalankan oleh seluruh masyarakat. Implementasi nilai tersebut terlihat dalam berbagai kegiatan seperti *ngayah* membersihkan lingkungan, pengelolaan sampah pada pelaksanaan upacara adat dan keagamaan, pelestarian kawasan suci, serta kegiatan penghijauan yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bali tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga menjadi bagian dari praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam penguatan desa adat untuk pengelolaan sampah. Beberapa desa adat masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah, khususnya karena belum meratanya ketersediaan TPS3R, bank sampah, serta fasilitas pengangkutan sampah. Di samping itu, keterbatasan pendanaan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program edukasi lingkungan dan pengembangan infrastruktur pendukung. Penelitian ini juga menemukan bahwa belum seluruh desa adat memiliki *pararem* yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah sehingga implementasi kebijakan masih berbeda-beda antarwilayah. Selain itu, koordinasi antara desa adat, desa dinas,

pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program pengelolaan sampah dapat berlangsung lebih terintegrasi dan berkesinambungan. Berdasarkan seluruh temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan desa adat perlu didukung melalui pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah daerah, desa adat, masyarakat, akademisi, sektor swasta, serta pelaku industri pariwisata. Pemerintah berperan sebagai penyusun kebijakan dan penyedia dukungan sumber daya, desa adat berfungsi sebagai penggerak sosial yang membangun kepatuhan masyarakat melalui aturan adat, sedangkan masyarakat menjadi pelaksana utama dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Di sisi lain, sektor swasta dan industri pariwisata diharapkan berkontribusi melalui penerapan praktik usaha yang ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, sementara perguruan tinggi berperan dalam penyediaan inovasi teknologi serta pendampingan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif dalam mengurangi timbunan sampah, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pariwisata berkualitas di Bali. Temuan penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan kelembagaan desa adat merupakan salah satu strategi yang relevan untuk dikembangkan sebagai model tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal yang dapat direplikasi pada daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial budaya yang serupa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Desa adat sebagai lembaga yang mengakar dimasyarakat perlu dikuatkan sehingga terbukti berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Bali. Kewenangan desa adat melalui *awig-awig* dan *pararem*, yang didukung oleh nilai-nilai Tri Hita Karana, mampu meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam

pengurangan, pemilahan, serta pengelolaan sampah dari sumbernya. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan desa adat, partisipasi masyarakat, penerapan kearifan lokal, dan dukungan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah.

Namun demikian, penguatan desa adat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur, pendanaan, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan. Sehingga keterlibatan seluruh pihak menjadi strategi penting dalam pengelolaan sampah yang berbasis pada kearifan lokal (Fanthia, 2025).

Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi desa adat dalam pengelolaan sampah melalui dukungan regulasi, pendanaan, peningkatan kapasitas, dan penyediaan infrastruktur. Desa adat didorong untuk menyusun *awig-awig* dan *pararem* yang secara spesifik mengatur pengelolaan sampah serta memperkuat mekanisme edukasi dan pengawasan berbasis komunitas.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, desa adat, pelaku usaha, dan masyarakat perlu diperkuat melalui pendekatan *collaborative governance* agar pengelolaan sampah tidak semata-mata berorientasi pada penanganan masalah jangka pendek, melainkan juga mampu berkontribusi pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pariwisata berkualitas di Bali. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model penguatan desa adat berbasis ekonomi sirkular atau melakukan studi komparatif antarwilayah untuk memperoleh model

pengelolaan sampah yang lebih adaptif dan dapat direplikasi di berbagai daerah.

REFRENSI

- Adhitama, V., & Soekamta, L. S. (2022). Pengaruh Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelayanan Retribusi Persampahan. *Jurnal DIALOGIKA*. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/dialogika/article/view/2113>
- Agung, I. G., Yuliartika, A., & Suryana, I. N. M. (2024). Kolaborasi Triple Helix Dalam Program Inovasi Desa (Studi Kasus : Desa Sanur Kaja , Kecamatan Denpasar Selatan , Kota Denpasar). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15, 253–262.
- Dewi, P. S. W., & Lilasari, L. N. T. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata Pakseballi di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Pengabdian Kepada* <https://ejournal.ppb.ac.id/index.php/makardhi/article/view/606>
- Fanthia, A. (2025). Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Anambas. ... : *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik*. <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/publika/article/view/5838>
- Ni Ketut Sri Lestari, Ni Putu Widya Astuti, I. N. P. (2022). Indeks Risiko Sanitasi Desa Wanasari , Kecamatan Tabanan , Kabupaten Tabanan. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen*, 3(2), 59–68. <https://doi.org/10.31284/j.jtm.2022.v3i2.3381>
- Permini, N., Junaedy, I. K. D., Wahyuni, M. D., & ... (2025). Governmentality Dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Gianyar Bali. *Moderat: Jurnal* <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/4979>
- Pratiwi, F. H., Islami, D. N., & Rajib, R. K. (2024). Strategi Pengendalian Sampah Plastik Guna Mendukung Kelestarian Hidup Di Kota Semarang Ditinjau Dari Perwal No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian *Jurnal Ilmiah Wahana* <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9328>
- Tresnawaty, B. (2020). Prinsip Kearifan Lokal 'Sabilulungan' dalam Pengembangan Strategi Kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. In *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/101089672/5075.pdf>